

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia saat ini merupakan suatu hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang telah peneliti baca melalui internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang kurang memadai. Seperti akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah masih belum sesuai dengan SAP. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kewajiban mengaudit laporan keuangan pemerintah. Banyak temuan yang ditemukan pada pengelolaan keuangan yang disajikan oleh para penyusun pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Setiap pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya. Demikian pula, pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Perihal ini sejalan dengan Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Roviyantie (2011)“ Laporan keuangan ialah media untuk suatu entitas, dalam perihal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik”. Untuk itu pemerintah daerah harus bisa dan mempunyai keahlian menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan itu wajib menyajikan data keuangan yang bermutu serta akuntabel cocok dengan syarat yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan kalau laporan keuangan pemerintah bisa dikatakan bermutu apabila laporan tersebut bersifat relevan, andal, bisa dimengerti, serta bisa dibanding. Mengaplikasikan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang sudah disusun serta disajikan sehingga pemerintah daerah sanggup mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan terpenuhinya laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah telah bermutu ataupun memenuhi ciri kualitatif laporan keuangan salah satunya dengan memperoleh Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan unit pemerintahan daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini, aspek pertama adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Roviyantje (2011) "Laporan keuangan adalah produk yang harus dibuat oleh departemen atau disiplin akuntansi." Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia, tenaga kerja yang kompeten yang berdampak besar pada hasil laporan keuangan yang berkualitas, serta satuan kerja pemerintah daerah. Menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas bagi pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai dan kompeten dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, apalagi organisasi terkait pemerintah.

Aspek kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan unit pemerintah daerah adalah penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi akan semakin memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas dan profesinya. Menurut Komarasari (2016), kurangnya kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal tidak dijamin jika tidak didukung oleh teknologi informasi. Semoga dengan ketersediaan teknologi informasi yang terus berkembang, dapat membantu dalam penyusunan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Aspek ketiga yang mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya sistem pengendalian intern. Tingkat kualitas laporan keuangan unit pemerintah daerah dapat ditentukan seberapa baik pengendalian intern pada instansi pemerintah daerah itu sendiri. Jika pengendalian internal lemah atau rendah, sehingga dalam mendeteksi adanya kecurangan, proses pelaporan keuangan tidak akan mudah, dan data audit yang diperoleh pemerintah daerah dari informasi / data akuntansi tidak akan akurat. Sistem pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan segala kemungkinan kesalahan atau kecurangan, tetapi sistem pengendalian internal yang baik dapat menghentikan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam batas-batas yang dianggap tepat, dan jika demikian maka akan segera dikenali serta diatasi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karimun pada tahun 2011 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan BPK-RI. Hal tersebut menunjukkan adanya manajemen kas daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

khususnya Kabupaten Karimun yang tidak memadai, penggunaan sisa DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk mendanai pengeluaran daerah diluar tujuan penggunaan. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai sehingga mengakibatkan realisasi pencairan dana BOS tidak sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan, sekolah penerima dana BOS tidak menerima penyaluran BOS sesuai dengan SK Alokasi dana BOS dan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat memperhitungkan sisa dana BOS yang terdapat di Kas Daerah dengan pencairan periode berikutnya. Pengendalian atas pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial belum memadai, yaitu dalam hal pengungkapan informasi penerima Hibah dan Bantuan Sosial dalam proses penganggaran tidak dilakukan secara memadai. Selain itu penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah belum memadai, terdapat pencatatan data kapitalisasi Aset Tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Aset Tetap Tanah) dan KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) yang belum dimutakhirkan sesuai kondisi sebenarnya. Hal tersebut mengakibatkan KIB menjadi tidak informatif dan belum dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Beberapa hal tersebut mungkin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal yang belum sepenuhnya diterapkan dengan baik pada pemerintah daerah Kabupaten Karimun.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penggunaan sampel dalam penelitian ini yaitu semua pengelola keuangan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Karimun, karena peneliti sebelumnya meneliti pada daerah Bantul. Dalam penelitian ini menambahkan variable pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen.

Berdasarkan pada uraian yang dijelaskan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain;

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan
3. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat diaplikasikan melalui teori dan praktek
2. Bagi pemerintah daerah, dapat memberikan bahan masukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas serta memberikan wawasan mengenai pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.